



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG

UNIT KERJA : PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RADEN MURWANTARA**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **415767**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.590.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2427 m2/50 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 970.800.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.020.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 298.750.000

1. MOBIL, TOYOTA CALYA MHKAGGJGJH J049739 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA GEAR 125 S VERSION Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.750.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 18.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 152.275.489

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.059.825.489

III. HUTANG Rp. 609.118.572

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

2.450.706.917

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.